

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dari teknologi informasi (TI) dan komunikasi kini semakin pesat diberbagai bidang. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya kebutuhan suatu instansi akan penerapan TI yang semakin meningkat guna untuk menunjang keberhasilan aktivitas dan meningkatkan kemampuan dalam kinerja. Adanya teknologi informasi dapat menyelesaikan suatu masalah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta membuka kreativitas manusia (Herlambang & Suharso, 2018). Fitur teknologi informasi meliputi pengumpulan, pemrosesan, pembangkitan, penyimpanan, pengambilan, dan transmisi. Teknologi informasi sebaiknya berfungsi dalam sebuah penyediaan dan orientasi layanan sehingga perusahaan atau sebuah instansi dapat menyelaraskan dengan adanya tujuan bisnis (Putra et al., 2021).

Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam pengembangan dan tata kelola organisasi. Implementasi teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan pada jalannya roda organisasi. Teknologi Informasi sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai pendukung bagi jalannya organisasi, tetapi Teknologi Informasi menjadi bagian utama dari sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Sehingga, dengan keberadaan Teknologi Informasi, maka pola pekerjaan, kinerja pegawai dan sistem manajemen akan berubah ke arah yang lebih baik dengan adanya

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis organisasi (Rio Septian Hardinata, Wirda Fitriani, Cahyo Pramono & Husni Muharam Ritonga, Leni Marlina, Suheri, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Agar implementasi tata kelola TI berjalan sesuai efektif dan efisien, sebuah organisasi melakukan evaluasi sejauh mana tata kelola TI yang berjalan dan dapat mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan (Majid, 2019).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informasi untuk daerah Kota Padang Panjang. Dengan hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berwenang untuk memberikan izin terkait dengan bidang dan daerah wilayah kerjanya. Dimana dalam seluruh kegiatannya menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja supaya efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan penggunaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika ditemukannya permasalahan seperti tidak semua produk yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ketika diimplementasikan tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Permasalahan ini dikarenakan sumber daya manusia kurang baik terhadap pemahaman teknologi digital, sehingga berdampak pada produk yang dihasilkan tidak termanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Agar hasil analisis tersebut dapat menghasilkan rekomendasi guna memperbaiki tata kelola TI yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota

Padang Panjang maka akan dilakukan analisis *Maturity Level*. Audit yang dilakukan menggunakan framework COBIT 4.1. COBIT (*Control Objective form information and related technology*) adalah framework tata kelola TI yang digunakan untuk mencapai kesenjangan antara masalah teknis resiko bisnis dan kebutuhan control. COBIT mengintegrasikan praktik – praktik yang baik dalam mengelola TI dan menyediakan metode untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengolahan resiko (Majid, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengukur tingkat kematangan TI yang digunakan untuk menunjang dan produktifitas pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang perlu dilakukan analisis Maturity Level dengan menggunakan metode COBIT 4.1 sehingga menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola TI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu “IMPLEMENTASI METODE COBIT 4.1 DALAM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
2. Bagaimana cara menghasilkan tingkat kematangan rekomendasi berdasarkan temuan hasil dari penerapan metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

### **1.3 Hipotesa**

Hipotesa merupakan praduga awal atas pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan menerapkan metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat membantu dan mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
2. Diharapkan dengan adanya rekomendasi dari hasil yang ditemukan maka dapat menghasilkan keputusan dan meningkatkan kinerja TI kearah yang lebih baik lagi

### **1.4 Batasan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah terhadap system penulisan, adapun batasan masalahnya yaitu :

1. Penggunaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Mengimplementasikan metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
3. Memfokuskan pada domain *Acquire Implementation* (AI2, AI3, AI4, AI5) dan *Deliver and Support* (DS7, DS10, DS12, DS13).

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil analisis *Maturity level* berdasarkan audit yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan metode COBIT 4.1 dalam audit teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
3. Untuk menghasilkan rekomendasi guna menyediakan perbaikan penggunaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terstandarisasi yang sesuai dengan fungsi teknologi informasi.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya audit dapat memberikan gambaran kinerja dari teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
2. Dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki penggunaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terstandarisasi yang sesuai dengan fungsi teknologi informasi.
3. Dapat menambah pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menganalisis suatu system informasi dan perhitungan data kuesioner.

### **1.7 Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Panjang**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang Panjang. Pada awalnya Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Padang Panjang ini bernama Dinas Hubungan Komunikasi Dan Informasi (Dishubkominfo) yang masih bergabung dengan Dinas Perhubungan pada tahun 2011 sampai akhir tahun

2016 dan pada 1 Januari 2017 Diskominfo sudah berdiri sendiri menjadi Dinas. Ketika masih bernama Dishubkominfo tugasnya adalah mengatur dan memberikan izin untuk akses Jaringan, warnet, mendirikan Radio dan Televisi Kabel. Namun, setelah berdirinya Diskominfo semua tugas tersebut menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Setelah berdiri , Diskominfo mempunyai 2 bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Bidang E-Government dan Teknologi Informasi. Secara umum tugas dari IKP sendiri yaitu untuk Penyebarluasan Informasi Publik dan E-Gov Layanan Aplikasi Terintegrasi dan memberikan layanan akses internet.